

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Tempat Pemrosesan Akhir Gunung Tugel Kabupaten Banyumas)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Gunung Tugel Kabupaten Banyumas juga menjelaskan relasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap politik implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Gunung Tugel Kabupaten Banyumas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif dekrptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis model interaksi Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data untuk menjamin validitas data.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan Gunung Tugel sebenarnya sudah menyalahi aturan karena ijin Gunung Tugel menurut SK sudah berakhir tahun 2003 dan di lapangan masih terus digunakan tanpa adanya peningkatan fasilitas yang memadai dan dengan volume sampah yang semakin meningkat maka akan semakin membahayakan keberadaan warga sekitar. Pemerintah Banyumas dengan kewenangannya membuat produk kebijakan berupa peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Dalam implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di TPA Gunung Tugel ini, pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi timbulan sampah sehingga tidak membebani TPA Gunung Tugel, salah satunya melalui bank Sampah. Dapat dikatakan pemerintah sudah membuat aturan namun pemerintah juga tidak melaksanakan dengan maksimal. Ada beberapa aktor yang terlibat di dalamnya. Pertama DPRD Komisi A yang merumuskan kebijakan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menghasilkan peraturan daerah ini.. Aktor selanjutnya yang terlibat dalam implementasi adalah Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, mulai dari sarana dan prasarana, sosialisasi, maupun berurusan dengan masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pengelolaan sampah, termasuk ganti rugi. Aktor yang terakhir adalah masyarakat, dalam hal ini adalah warga desa Kedungrandu sebagai penerima kebijakan. Dalam hal ini, warga desa Kedungrandu merupakan warga yang terkena dampak langsung dari adanya pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Gunung Tugel.

Kata Kunci : politik implementasi, peraturan daerah, aktor, pengelolaan sampah, tempat pemrosesan akhir

SUMMARY

The title of this research is “Politik implementation of Regulation No 6 in 2012 about The Waste Management in Banyumas (Case study is on Gunung Tugel landfill in Banyumas)”. the purposes of this research are for understanding and describing the implementation of this regulation and the relation between the local government and Banyumas citizen to the politik implementation of regulation no 6 in 2012 about the waste management in Gunung Tugel Landfill, Banyumas

The method of this research is qualitative method with descriptive qualitative approach. Data obtained from the result of observation, interviews, and documentation. The analysis of the data is using an interactive model analysis by Miles and Huberman. This study used data triangulation technique to ensure the validity of the data.

The result of this research shows that Gunung Tugel Landfill was breaking the rule because the license of Gunung Tugel was expired at 2003, and the fact that this landfill still active without increase its facilities and increasing the amount of waste, it will jeopardize the people near that landfill. For this implementation, the local government has made rules to decrease the amount of waste, so it won't load Gunung Tugel landfill by making a junk bank. But, this policy isn't able yet to decrease the amount of waste significantly. There were some actors involved. First, DPRD Komisi A, as formulating the policy with Banyumas regent. The next actor is DLH that has responsibility to manage waste from the facilities, socialization, and dealing with the people related the effect from waste management activities include the compensation. The last actor is people nearby, that is the villagers of Kedungrandu village as policy's recipients. The villagers of Kedungrandu were people that was got the effect directly from waste management in Gunung Tugel landfill

Keywords : political implementation, local regulation, actors, waste management, landfill